

Kesenjangan Angka Partisipasi Pemilih (PILKADA Riau 2018 dengan PEMILU 2019 di Riau)

Voter Participation Rate Gap (PILKADA Riau 2018 with the Election 2019 in Riau)

Hasanuiddin^{1*}, Annas Rizaldi² Auradian Marta³, Ishak⁴

^{1,3,4} Ilmu Pemerintahan Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia

²LKSPK, Pekanbaru, Indonesia

*Email Korespondensi: hasanuiddin@lecturer.unri.ac.id

Diterima: 15 November 2021

Direvisi: 4 Desember 2021

Disetujui: 28 Desember 2021

DOI: 10.35967/njip.v20i2.219

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menjelaskan kondisi kesenjangan angka partisipasi pemilih di antara Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019 di Riau. Pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2018, tingkat partisipasi pemilih relatif rendah. Berbeda dengan pada Pemilu di Riau tahun 2019, partisipasi pemilih relatif tinggi dan berbeda secara signifikan. Pertanyaannya adalah faktor apa yang menjadi penyebab kesenjangan angka partisipasi pemilih tersebut? Pertanyaan menjadi menarik, karena kenyataannya dua momentum pemilihan yang berbeda ini diikuti sebagian besar pemilih yang sama, berlangsung dalam jarak waktu yang relatif pendek dan dilakukan di tempat yang sama. Banyak pilihan teoritis untuk menjelaskan kondisi kesenjangan yang ada, tetapi mempertimbangkan dua pemilihan itu dilakukan dalam waktu yang berdekatan, sehingga tidak rasional mengasumsikan terdapat perubahan besar pada kondisi pemilih, maka penelitian ini melihat perbedaan faktor stimuluslah yang menjadi penyebab kesenjangan sebagaimana diteorisasikan oleh Milbrath. Pendekatan metode dalam penelitian ini menggunakan *mix-method* (campuran) dengan penekanan pada metode kualitatif. Sedangkan tipologi penelitian yang diterapkan yaitu *causal comparative research*. Penelitian ini menemukan tiga faktor utama yang menjadi penyebab kesenjangan angka partisipasi pemilih pada dua momentum pemilu tersebut yaitu: Pertama, perbedaan jumlah aktor politik yang berkepentingan untuk memberi stimulus pada pemilih; Kedua, gaung politik yang menstimulus pemilih untuk mengidentifikasi pada calon tertentu yang sedang berkontestasi dan terdorong untuk memenangkannya; ketiga, pengaruh media massa dan media sosial. Penelitian ini menyarankan, Pilkada dilaksanakan bersamaan dengan pileg daerah sedangkan Pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pileg nasional untuk menyeimbangkan partisipasi pemilih.

Kata Kunci: Kesenjangan, Faktor Stimulus, Causal Comparative research

Abstract: This study aims to explain the condition of the gap in voter participation rates between the 2018 Riau Pilkada and the 2019 Election in Riau. In the 2018 Riau Province Pilkada, voter participation rates were relatively low. In contrast to the election in Riau in 2019, voter participation was relatively high and significantly different. The question is what are the factors that cause the gap in the voter turnout rate? The question becomes interesting, because in fact these two different election momentum were followed by the majority of the same voters, took place in a relatively short time interval and were held in the same place. There are many theoretical options to explain the condition of the existing gap but considering that the two elections were conducted in close proximity, so it is irrational to assume that there is a big change in the condition of voters, this study looks at the difference in stimulus factors that causes the gap as theorized by Milbrath. The method approach in this study uses a *mix-method* with an emphasis on qualitative methods. While the typology of research applied is *causal comparative research*. This study found three main factors that caused the gap in voter participation rates in the two election momentums, namely: First, the difference in the number of political actors with an interest in providing stimulus to voters; Second, political echoes that stimulate voters to identify certain candidates who are contesting and are motivated to win them; third, the influence of mass media and social media. This study suggests that the Pilkada be held simultaneously with the regional legislative elections while the presidential elections are carried out simultaneously with the national elections to balance voter participation.

Keywords: Gaps, Stimulus Factors, Causal Comparative research

Pendahuluan

Bangunan legitimasi rezim hasil pemilu dimulai dengan kuantitas dan kualitas dukungan pemilih dalam politik elektoral. Joseph Schumpeter menjelaskan pemilihan umum sebagai metode demokrasi, artinya beroperasinya demokrasi dilihat dari proses-proses yang berjalan dalam pemilihan umum (Varma, 1995). Lebih spesifik, Robert A. Dahl menunjuk partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur demokrasi (Dahl, 1994). Partisipasi pemilih menempati posisi sentral dalam melihat keberhasilan pemilihan umum dikaitkan dengan konsolidasi demokrasi. Pada dasarnya ikut terlibat dalam politik dengan memberikan suara pada pemilu merupakan bukti masyarakat yakin bahwa mekanisme pemberian suara dalam pemilihan umum memiliki efek politik (*political efficacy*) (Vickery, 2011). Memberikan hak pilih dalam pemilihan umum merupakan kontrol terhadap pergantian elite politik dalam pusaran kekuasaan terlebih berkenaan dengan kebijakan (Weiss(Eds), 2018). Analoginya yaitu “demokrasi berarti bahwa rakyat memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak orang-orang yang mencalonkan diri untuk memimpin mereka” (Heywood, 2014).

Partisipasi pemilih secara umum dimaknai sebagai keikutsertaan warga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemungutan suara (*voting*) yang merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik (Ramadhanil, 2015). Hal yang demikian ini identik dengan tindakan seperti memberikan suara pada pemilu, terlibat sebagai anggota partai politik atau aktif dalam gerakan sosial (Gaffar, 1997). Dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, *voting* juga bisa dibaca sebagai upaya ikut serta yang dilakukan oleh masyarakat dalam sebuah pemilihan umum, baik itu pemilihan Presiden (eksekutif) ataupun pemilihan Anggota Dewan (legislatif) (Sorensen., 1993). Dalam studi ilmu politik, partisipasi politik masyarakat bisa berasal dari basis sosial-politik seperti kelas, kelompok, lingkungan sekitar, dan faksi (Budiardjo, 2008).

Secara umum berkaitan dengan perilaku memilih dalam partisipasi politik termasuk di dalamnya keputusan memilih (*voting turn out*) atau tidak memilih (*non-voting*) dipengaruhi oleh ragam faktor atau pendekatan (Roth, 2009). Bisa jadi seseorang bisa terlibat aktif berpartisipasi karena faktor kepuasan finansial yang menyertainya (Maran, 2007). Namun hal yang demikian tidak terjadi pada mereka yang mapan secara ekonomi (finansial) (Sierra, 2018). Bahkan bisa jadi seseorang hanya akan terlibat aktif berpartisipasi jika mereka mempunyai waktu luang, uang, keahlian kognitif, dan sumber daya lainnya (T. Ishiyama, 2013). Termasuk juga di dalamnya berkenaan dengan tingkat pendidikan seseorang yang membawa pengaruh terhadap partisipasi dalam politik (Abednego & Astrika, 2019). Namun satu hal yang pasti ialah kesadaran dan partisipasi politik yang dimiliki oleh suatu masyarakat berbeda satu sama lain. Hal yang demikian tergambar dalam konsep perilaku memilih dalam partisipasi politik masyarakat seperti sikap apatisisme, alienasi, dan kekerasan politik (Maran, 2007).

Berangkat dari konsepsi partisipasi pemilih dalam politik elektoral, ada hal yang menarik dengan tingkat partisipasi pemilih di Riau pada dua momentum politik elektoral, yaitu Pilkada Riau tahun 2018 dan Pemilu serentak tahun 2019 silam. Pemilu tahun 2019 bisa dikatakan menjadi salah satu kontestasi politik elektoral terbesar sepanjang sejarah perpolitikan di Indonesia. Untuk pertama kalinya pula Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Umum (pemilihan Anggota Legislatif) dari berbagai tingkatan, baik dari tingkat pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota hingga Provinsi serta pemilihan anggota DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tingkat pusat.

Pemilu tahun 2019 sangat bergairah dan mampu menyedot perhatian khalayak banyak. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadi peningkatan pada level partisipasi pemilih dibandingkan dengan perhelatan pemilu-pemilu sebelumnya. Merujuk data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu tahun 2019 mencapai angka 199.987.870 orang. Adapun pemilih yang menggunakan hak suaranya (hak pilih) berjumlah 158.012.506 orang. KPU Pusat menerangkan bahwasanya partisipasi pemilih pada

Pemilu tahun 2018 terjadi peningkatan. Di mana angka partisipasi pemilih menyentuh angka 81 persen, melebihi sebagaimana target partisipasi pemilih secara nasional yaitu 77,5 persen (Farisa, 2019).

Meningkatnya partisipasi pemilih ternyata tidak hanya terjadi pada level nasional, tetapi juga diikuti pada level daerah-daerah di Indonesia. Ini dibuktikan di Provinsi Riau, di mana partisipasi pemilih tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, namun juga terjadi di hampir seluruh Kabupaten/Kota. Untuk wilayah Provinsi Riau, partisipasi pemilih menyentuh angka 78 persen dan melampaui capaian target yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi Riau (75%). Bahkan partisipasi pemilih kali ini meningkat jauh jika dibandingkan dengan partisipasi pemilih pada saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 yang hanya menyentuh angka 62,73 persen. Berdasarkan data dari KPU Provinsi Riau, terdapat beberapa kabupaten/kota yang memiliki persentase tinggi hingga 80 persen lebih (Anggoro, 2019).

Perbandingan partisipasi pemilih pada Pemilu tahun 2019 dengan Pilkada 2018 di Provinsi Riau menjadi menarik untuk dilihat lebih jauh. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2018 di Provinsi Riau hanya berkisar 58 persen. Berbeda dengan Pemilu tahun 2019 yang terjadi peningkatan signifikan pada partisipasi pemilih. Kesenjangan angka partisipasi pemilih dalam penelitian ini dimaknai sebagai perbedaan angka keterlibatan warga negara memberikan suara dalam dua momentum pemilihan yaitu Pilkada Riau 2018 dan Pemilu 2019. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2018 dan Pemilu tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 1 (Sukmana, 2018).

Tabel 1. Perbandingan partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018 dan Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau

No	Nama Kabupaten	DPT		Persentase Partisipasi Pemilih		
		Pemilu 2019	Pilkada Riau 2018	Pemilu 2019	Pilkada Riau 2018	Selisih
1	Kepulauan Meranti	147.517	135.461	71,788%	56,564%	15,224%
2	Kampar	510.475	449.804	80,144%	56,823%	23,321%
3	Indragiri Hulu	301.342	270.512	79,323%	51,644%	27,679%
4	Bengkalis	412.262	363.873	77,615%	53,314%	24,301%
5	Indragiri Hilir	491.150	448.503	70,567%	60,306%	10,261%
6	Pelalawan	226.417	193.622	80,688%	61,207%	19,481%
7	Rokan Hulu	339.328	310.627	81,369%	58,945%	22,694%
8	Rokan Hilir	417.327	372.645	76,253%	59,059%	17,194%
9	Siak	297.161	267.380	78,619%	60,451%	18.168%
10	Kuantan Singingi	232.018	214.156	81,856%	57,234%	24,622%
11	Kota Pekanbaru	611.093	497.880	78,223%	62,166%	16,057%
12	Kota Dumai	199.963	174.249	80,094%	54,142%	25,622%

Sumber: Data diolah (2021).

Berkaca pada kesenjangan angka partisipasi pemilih pada dua momentum politik elektoral tersebut, maka menjadi menarik untuk ditelaah lebih jauh dan mendalam. Karena selisih waktu antara Pilkada Provinsi Riau dengan Pemilihan Umum tahun 2019 secara nasional hanya berselang satu tahun. Sehingga kesenjangan angka partisipasi pemilih dalam momen politik yang berbeda pada pemilih yang sama menjadi penting untuk dikaji dan ditelaah lebih jauh terutama berkaitan dengan faktor penyebabnya, karena dapat dijadikan sebagai pijakan menyusun kerangka praktis upaya peningkatan partisipasi pemilih. Kondisi apa sesungguhnya yang kurang hadir pada Pilkada Riau 2018 sehingga menyebabkan angka partisipasi pemilih rendah dan kondisi apa yang hadir secara kuat pada Pemilu 2019 sehingga menyebabkan angka partisipasi lebih tinggi. Oleh karena itu, atas dasar inilah kajian dilakukan untuk melihat penyebab terjadinya kesenjangan angka partisipasi pemilih di provinsi Riau pada perhelatan Pilkada tahun 2018 dan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.

Metode Penelitian

Pada dasarnya, studi penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan campuran (*mix-method*). Sedangkan tipologi penelitian lebih kepada tipe *causal comparative research*, yaitu; melihat persoalan penelitian berdasarkan perbandingan dari angka persentase partisipasi pemilih dalam pemilu tahun 2019 (Pilpres, DPR dan DPD) di Provinsi Riau dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 di Provinsi Riau.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu berasal dari data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari informan penelitian seperti tokoh masyarakat, pengamat politik, KPPS, serta masyarakat di Kabupaten Indragiri Hulu, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, dengan harapan bahwa akan mendapatkan informasi yang mendalam (*in-depth interview*) perihal penelitian yang dilakukan (penyebab perbedaan tingkat partisipasi pemilih antara Pilkada Riau 2018 dengan Pemilu 2019 di Riau). Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen hasil dari kontestasi politik (Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 di Provinsi Riau) dan juga dokumen dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Provinsi Riau.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menelusuri dokumen yang sudah ada di KPU dan BPS Provinsi Riau; kemudian dilanjutkan dengan melakukan aktivitas wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan penelitian; serta melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) guna untuk mengkonfirmasi hasil penelitian kepada berbagai pihak yang dianggap memiliki kapabilitas terkait penelitian yang dilakukan.

Teknik dalam menentukan informan penelitian tentu berdasarkan *database* yang dimiliki berkaitan dengan persentase partisipasi pemilih dan surat suara rusak pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2018 di Provinsi Riau. Sehingga berdasarkan beberapa indikator yang telah ditentukan sebelumnya, kota Pekanbaru dan Kota Dumai mewakili daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi serta surat suara rusak yang rendah. Sedangkan Kabupaten Indragiri Hulu dipilih berdasarkan kriteria surat suara rusak yang tinggi pada Pemilu 2019 silam.

Penyajian data yang dilakukan terkait dengan perbandingan angka partisipasi pemilih menggunakan tabel dan grafik berdasarkan *database* yang dimiliki oleh KPU provinsi Riau dan KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya berdasarkan paparan data tersebut dilakukan analisis mendalam terhadap hasil wawancara dan FGD yang kemudian disajikan dengan naratif deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Jika membandingkan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018 (58 persen) dengan Pemilu 2019 (78 persen) di provinsi Riau, tentu saja perbedaan angka partisipasi pemilih terjadi peningkatan. Selisih angka 20 persen tersebut tentu merupakan jarak yang besar dan signifikan. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan guna melacak penyebab terjadinya

perbedaan sikap politik (partisipasi) masyarakat di Provinsi Riau dalam dua momentum politik tersebut.

Selisih angka partisipasi dalam dua momentum politik tersebut tentu disebabkan beragam macam faktor. Penelitian ini melihat tiga faktor utama yang menjadi penyebab kesenjangan angka partisipasi pemilih pada dua momentum pemilu tersebut yaitu; **Pertama**, perbedaan jumlah aktor politik yang berkepentingan untuk memberi stimulan pada pemilih. Aktor penstimulan yang dimaksud adalah orang-orang yang berkepentingan langsung memberikan stimulus kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam arena pemilu. Aktor penstimulan dapat diidentifikasi pada dua kelompok besar yaitu kelompok penyelenggara pemilu karena tugasnya (KPU) dan kelompok kontestan pemilu baik partai politik ataupun perorangan yang menjadi kandidat. Dalam hal ini, kelompok penyelenggara pemilu diabaikan dalam pembahasan karena baik pada Pilkada tahun 2018 maupun Pemilu 2019 pihak penyelenggara pemilu melakukan tugas yang sama dalam memberikan stimulus pada pemilih (Malfindo Marlon Mau Awang, 2021; Zuhro, 2019).

Partai politik, meskipun sama-sama berperan dalam mendukung kandidat yang didukungnya untuk memenangkan pemilihan baik dalam Pilkada 2018 maupun Pemilu 2019, akan tetapi intensitas keterlibatan partai berbeda dalam dua momentum tersebut. Pada Pilkada 2018 partai politik berposisi sebagai instrumen pendukung baik sebagai partai pengusung ataupun sebagai partai pendukung. Berbeda dengan Pemilu 2019, partai politik harus bekerja keras *all-out* meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS karena partai berkepentingan memenangkan pemilihan atau minimal dapat lolos *parliamentary threshold*.

Aktor yang sangat berkepentingan mempengaruhi pemilih adalah kandidat beserta tim pemenangannya yang langsung berkontestasi dalam dua momentum pemilihan tersebut (lihat Tabel. 1). Dilihat dari jumlah aktor yang terlibat, Pilkada 2018 kalah jauh dibanding Pemilu 2019. Pada Pilkada 2018, kontestan yang berkompetisi langsung berjumlah 8 orang dari 4 pasangan calon. Jika diasumsikan 4 pasangan calon didukung oleh tim pemenangan masing-masing 200 orang maka jumlah aktor yang terlibat hanya 808 orang yang akan membujuk pemilih di 11 kabupaten-kota di Riau. Pada sisi lain, momentum Pemilu 2019 melibatkan aktor yang berkontestasi langsung sejumlah 5459 orang ditambah tim pemenangan sekitar 108.578 orang mengkover wilayah yang sama dengan Pilkada 2018. Tabel berikut menguraikan estimasi jumlah aktor pada Pemilu 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Aktor yang Berkepentingan Langsung pada Pemilu 2019

No	Jenis Pemilihan	Jumlah Calon	Jumlah Tim Pemenangan
1	Presiden/Wakil Presiden	4	2.200
2	DPR-RI	183	1.830
3	DPD-RI	44	440
4	DPRD Riau	917	9.170
5	DPRD Kab-Kota	4.411	44.110
Jumlah		5.459	108.578

Sumber: Data olahan dari berbagai sumber (2021)

Pemilu 2019 melibatkan aktor kandidat yang memperebutkan jabatan: Presiden dan Wakil presiden 2 pasangan calon atau 4 orang, melibatkan minimal 2200 orang tim pemenangan dengan asumsi masing-masing kabupaten kota di Riau terdapat 100 orang anggota tim pemenangan; DPR RI terdapat 183 calon untuk semua partai, melibatkan DPR RI melibatkan 10 orang yang membantunya; DPD RI ada 44 calon melibatkan tim pemenangan 440 orang; DPRD Riau terdapat 917 calon melibatkan 9170 orang tim pemenangan; DPRD kabupaten-kota ada

5459 calon yang melibatkan sekitar 54590 orang tim pemenangan. DPD, DPRD Riau dan DPRD kabupaten kota menggunakan asumsi yang sama dengan DPR RI. Dalam hal ini jumlah aktor yang berkempangan langsung menghadirkan pemilih ke TPS pada Pemilu 2019 jauh lebih besar dibanding pada Pilkada 2018.

Kedua, faktor meningkatnya partisipasi pemilih yaitu sehubungan dengan gaung politik yang menstimulasi pemilih untuk mengidentifikasi pada calon tertentu yang sedang berkontestasi dan terdorong untuk memenangkannya. Fenomena meningkatnya partisipasi politik pada pemilu tahun 2019 senada dengan apa yang dibayangkan oleh Milbrath, di mana seorang warga negara akan terlibat dalam partisipasi politik karena adanya perangsang, situasi lingkungan politik, serta karakter pribadi dan sosial (Mas'ood, 2001). Pemilu tahun 2019 disambut antusias oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak terkecuali dengan masyarakat di Provinsi Riau. Dinamika politik yang terjadi begitu terasa khususnya pada level pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Jika kita melihat dari padatnya kontestasi politik yang tersaji, maka dinamika politik yang muncul juga menyertai sejak awal mula gaung politik kala itu (tahun 2018). Beberapa dinamika yang muncul ke permukaan yang bisa secara langsung dilihat yaitu terjadinya pembelahan sikap politik baik dari kalangan elite nasional maupun elite politik di tingkat daerah, bahkan diikuti oleh gesekan yang berujung perpecahan di kalangan akar rumput (masyarakat) karena perbedaan pilihan atau sikap politik. Tentu saja pembelahan di kalangan masyarakat lahir dari konsumsi informasi yang diperoleh dari berbagai berita baik dari media massa hingga media sosial.

Salah satu alasan meningkatnya angka partisipasi pemilih pada pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Riau yaitu karena masyarakat tertarik untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih pada saat itu, kesadaran politik seperti *volunteer* yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden lahir, hadir dan semakin bertumbuh pada dinamika politik elektoral kala itu (Ganjar & Padjadjaran, 2020). Berbeda pula sikap politik masyarakat pada Pilkada Riau tahun 2018, di mana masyarakat kurang bersemangat dalam pesta demokrasi di tingkat lokal (provinsi). Hal tersebut ditengarai karena masyarakat menganggap calon yang maju dalam kontestasi Pilkada tidak begitu populer jika dibandingkan dengan calon presiden dan wakil presiden yang begitu populer di kalangan masyarakat.

Berdasarkan pengakuan masyarakat terkait partisipasi pemilih yang rendah pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2018 tentu tidak mengejutkan. Di mana masyarakat di beberapa wilayah yang jauh dari perkotaan tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai sosok calon Gubernur dan Wakil gubernur yang akan mereka pilih. Disisi lain, masyarakat merasa berpartisipasi dalam pemilihan tersebut tidak berdampak pada kehidupan masyarakat. Sehingga apatis muncul karena harapan dan suara masyarakat tidak terakomodasi oleh elite politik yang cenderung lebih abai terhadap kebutuhan masyarakat di daerah-daerah pelosok. Ragam pengakuan tersebut lumrah kita dengar dari masyarakat akar rumput mengingat gaung politik yang lesu terjadi pada level Pilkada di tingkat daerah (Provinsi).

Fenomena perbedaan sikap politik masyarakat pada dua momentum politik elektoral (Pilkada Riau tahun 2018 dengan Pemilu serentak tahun 2019) menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh. Faktor gaung politik memiliki peran besar terhadap keikutsertaan masyarakat di Provinsi Riau untuk ambil bagian dalam memberikan hak suara dalam pemilu serentak tahun 2019. Ditambah lagi dengan dinamika politik nasional lebih menguat akibat ragam isu dan opini yang berkembang mampu diakses oleh segala lapisan masyarakat. Bahkan masyarakat merasa dinamika politik pada level daerah tidak semenarik pemilu serentak tahun 2019 silam. Karena masyarakat meyakini bahwa dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden akan membawa dampak terhadap kelangsungan hidup mereka (melalui kebijakan-kebijakan politik), di mana terdapat masyarakat yang menginginkan perubahan atau berharap rezim politik yang saat ini melanjutkan program-program kerjanya.

Ketiga, pengaruh media massa dan media sosial. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, media memegang peran besar dalam meningkatnya partisipasi politik masyarakat

pada Pemilu serentak tahun 2019 silam. Baik itu media massa, media elektronik, media cetak dan tentunya kehadiran media sosial menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat dalam menikmati sajian informasi (Utami, 2020). Kecepatan informasi yang beredar membuat masyarakat semakin kaya dan beragam informasi yang diperoleh terutama tentang politik dan kebijakan. Preferensi politik masyarakat tentu saja sangat dipengaruhi oleh konsumsi berita yang dipilih oleh masing-masing individu. Terlebih masyarakat pemilih juga melihat sejauh mana media menjadi penyeimbang dalam menyajikan berita kepada khalayak (Khotimah & Pillars, 2019).

Bagi penikmat media *mainstream* (seperti TV, Radio dan Koran), maka sajian informasi tentang dinamika politik elektoral dan perkembangan isu-isu politik terkini dengan sangat mudah untuk diakses, dibaca dan ditonton. Belum lagi kehadiran media sosial (seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, Youtube dan lain sebagainya) menjadi sebuah kanal menjanjikan bagi para tim pemenangan untuk menjangkau ide dan gagasan politik sebagai media kampanye pemenangan calon (Laksmitha & Susanto, 2019). Bagi masyarakat, tentu saja informasi yang kaya tersebut dijadikan referensi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan memutuskan pilihan politiknya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bentuk lain dari partisipasi masyarakat menguat dalam penyampaian opini, kritikan, memberikan ide dan gagasan melalui media sosial merupakan alternatif baru dalam berdemokrasi (Dennis, 2019).

Media sosial memegang peran besar dalam partisipasi politik masyarakat dewasa ini. Terlebih media sosial kini menjadi arena yang menjanjikan bagi para politisi untuk saling unjuk ide dan gagasan. Bahkan sejak pemilu 2014, media massa atau media sosial menjadi arena *campaign* dan “jualan” bagi kandidat calon presiden dan wakil presiden atau elite politik lainnya (Herpamudji, 2015). Bahkan *buzzer-buzzer* politik, berita *hoax* bermunculan bersamaan dengan kontestasi politik elektoral (Hui, 2020). Sehingga dinamika politik di media sosial memberi warna dalam partisipasi politik akhir-akhir ini, baik bagi pemilih pemula maupun bagi masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai preferensi politiknya selain media *mainstream* yang ada (Juditha, 2017, 2019; Media, 2014; Nur Wardhani, 2018).

Berdasarkan fakta dan data, salah satu musabab ketimpangan persentase partisipasi pemilih pada Pilkada Provinsi Riau tahun 2018 dengan Pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Riau dipengaruhi oleh “rangsangan” media. Masyarakat menikmati *euforia* politik elektoral melalui berbagai rangsangan opini politik yang ditawarkan oleh media, terutama pemberitaan tentang kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 (Perdana & Wildianti, 2018). Berbeda dengan Pilkada Provinsi Riau tahun 2018 silam, masyarakat cenderung mendapat informasi tentang dinamika politik elektoral hanya mengandalkan pemberitaan dari TV dan koran berbasis lokal, serta kampanye tim pemenangan calon dan itu pun tidak secara masif dilakukan di seluruh pelosok daerah. Sehingga keterbatasan informasi menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018.

Namun menjadi menarik juga bahwa terdapat temuan meningkatnya partisipasi pemilih di salah satu perhelatan Pilkada di tingkat kabupaten yang diselenggarakan pada masa pandemi di Provinsi Riau (Hasanuddin et al., 2021). Hal ini kemudian dirasa perlu dikaji dan ditelaah lebih jauh dan mendalam untuk memperkaya perspektif tentang partisipasi pemilih pada masa pandemi. Sehingga ke depannya mampu menyajikan data tentang perbandingan partisipasi pemilih pada level nasional, provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Riau. Terlebih akan dilaksanakannya beberapa Pilkada di tingkat daerah di nusantara pada masa pandemi.

Kesimpulan

Meningkatnya partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 di Riau yang menyebabkan kesenjangan angka partisipasi pemilih dibanding Pilkada Riau 2018, secara teoritis terkonfirmasi dengan temuan data di lapangan. Kesenjangan angka partisipasi pemilih disebabkan kuatnya rangsangan yang diterima pemilih pada pemilu 2019 di Riau dan kondisi sebaliknya pada Pilkada Riau 2018. Banyaknya aktor yang terlibat dalam menstimulus pemilih, gaung politik dan

peran media massa yang besar, menjadi penyebab tingkat partisipasi masyarakat (pemilih) meningkat di Provinsi Riau pada Pemilu serentak tahun 2019. Stimulus gaung politik yang kemudian digemakan oleh media massa konvensional ataupun media sosial terbukti efektif mendorong peningkatan angka partisipasi pemilih. Di sisi lain, kehadiran tim kampanye pemenangan calon dilakukan “satu paket” mulai dari anggota DPR RI hingga anggota DPRD Kabupaten/Kota “turun gunung” menyapa masyarakat akar rumput, sehingga sangat mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam memberikan hak suaranya.

Pemandangan berbeda terjadi dengan partisipasi pemilih pada Pilkada Riau tahun 2018 silam, di mana minimnya jumlah aktor yang terlibat dalam menstimulasi pergerakan masyarakat relatif kecil. Ini dibuktikan dengan para kontestan tidak menyempatkan diri untuk turun ke basis konstituen yang berada di berbagai pelosok desa. Selain itu, gaung politik tidak begitu dirasakan oleh masyarakat pemilih karena isu dan opini publik yang dibangun dan berkembang tidak begitu diminati. Tentu saja ini terjadi karena masyarakat merasa elite politik dan pemimpin di tingkat daerah (provinsi) abai terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga akumulasi dari rasa kecewa inilah muncul sikap apatis dalam partisipasi politik (memberikan hak suara dalam Pilkada).

Sebagai catatan, dalam upaya mengatasi kesenjangan angka partisipasi pemilih oleh penyelenggara negara yang berkaitan dengan pemilu perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti; Memperbesar jumlah aktor-aktor yang berkepentingan terhadap tingginya partisipasi pemilih; Pilkada selayaknya didesain serupa dengan pemilu serentak yang melibatkan calon dalam jumlah besar; Pilkada mestinya tidak diserentakkan dengan Pilkada yang lain karena calon yang berkontestasi tetap sedikit, tetapi diserentakkan dengan pemilihan legislatif pada tingkat daerah yang sama; Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur diserentakkan dengan pemilihan anggota DPRD Provinsi. begitu juga dengan pemilihan Bupati-Wakil Bupati.

Daftar Pustaka

- Abednego, B. A., & Astrika, L. (2019). *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 di Kecamatan Cakung Jakarta* Journal of Politic and Government. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/25025/22280>
- Anggoro, F. (2019, September 8). *Antaranews.com. Partisipasi Pemilu 2019 di Riau capai 78 persen.* . Dipetik September 8, 2019, dari <https://riau.antaranews.com/berita/118082/partisipasi-pemilu-2019-di-riau-capai-78-persen> : <https://riau.antaranews.com>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1994). *Analisis Politik Modern*. Jakarta: PT BUMI AKSARA.
- Dennis, J. (2019). *Beyond Slacktivism: Political Participation on Social Media*. Mac. Milan: Palgrave .
- Farisa, F. C. (2019, 05 27). <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/27/16415251/kp-u-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen>. Dipetik September 10, 2019, dari Kompas.com: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>
- Gaffar, A. (1997). *Menampung Partisipasi Politik*. JSP, Vol I(1),8-26.
- Ganjar, A., & Padjadjaran, U. (2020). *Political Participation Convergence in Indonesia : A Study of Partisan Volunteers in the 2019 Election Political Participation Convergence in Indonesia : A Study of Partisan Volunteers in the 2019 Election*. June. <https://doi.org/10.7454/jp.v4i2.225>
- Hasanuddin, H., Marta, A., Asrida, W. (2021). *Menilai Kualitas Pilkada dalam Era Pandemi: Studi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1), 59-67.

- Herpamudji, D. H. (2015). *Strategi Kampanye Politik Prabowo-Hatta dan Perang Pencitraan di Media Massa dalam Pemilu Presiden 2014*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13-24.
- Heywood, A. (2014). *Politik (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hui, J. Y. (2020). SOCIAL MEDIA AND THE 2019 INDONESIAN ELECTIONS: Hoax Takes the Centre Stage. *Southeast Asian Affairs, ISEAS - Yusof Ishak Institute*, 155–172.
- Juditha, C. (2017). *HATESPEECH di MEDIA ONLINE : KASUS PILKADA DKI JAKARTA 2017*. *HATESPEECH IN ONLINE MEDIA: JAKARTA ON ELECTION 2017*.
- Juditha, C. (2019). *Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia Buzzer in Social Media in Local Elections and Indonesian Elections*. 199–212.
- Khotimah, N., & Pillars, H. (2019). TANTANGAN INDEPENDENSI MEDIA DALAM PEMILU: KASUS KOMPAS.COM. *Islamic Communication Journal*, 4(2), 133–145.
- Laksmitha, N., & Susanto, E. H. (2019). Partisipasi Politik Generasi Milenial di Instagram dalam Pemilu 2019. *Koneksi*, 3(1), 250. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i1.6218>
- Malfindo Marlon Mau Awang, R. T. (2021). *Peran Elit Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Serentak 2019 (Studi Di Desa Tanarara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur)*. *Jurnal Politicon*, X(1), 39–42.
- Maran, R. R. (2007). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mas'ood, M. &. (2001). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Media, S. (2014). *Ardha: Social Media sebagai media kampanye partai ...* 13(01), 105–120.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Perdana, A., & Wildianti, D. (2018). Narasi Kampanye dan Media Sosial dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. *Jurnal Bawaslu DKI, Desember*(December 2018), 21–39.
- Ramadhanil, F. d. (2015). *Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia dan perludem.
- Roth, D. (2009). *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori-teori, Instrumen dan Metode*. Jakarta: Lembaga Survei Indonesi.
- Sierra, L. F. (2018). *Beyond the Turnout Paradox The Political Economy of Electoral Participation*. -: Springer International Publishing.
- Sorensen., G. (1993). *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses Dan Prospek Dalam Sebuah Dunia Yang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sukmana, Y. (2018, Juli 12). *Kompas.com. Persentase partisipasi Pilkada 2019 Papua tertinggi, Riau dan Kaltim Terendah*. . Dipetik September 11, 2019, dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/07/12/23504431/persentase-partisipasi-pilkada-2019-papua-tertinggi-riau-dan-kaltim-terendah>: <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com>
- T. Ishiyama, J. &. (2013). *ILMU POLITIK dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.
- Utami, F. (2020). Media Sosial Dan Partisipasi Politik Milenial Riau. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 3(1), 65–84. <https://doi.org/10.36341/jdp.v3i1.1158>
- Varma, S. (1995). *Teori Politik Madern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Vickery, C. (2011). *Pedoman Untuk Memahami, menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu (Terjemahan)*. Amerika Serikat: IFES.
- Weiss(Eds), E. H. (2018). *Political Participation in Asia, Defining and Deploying Political Space*. New York: Routlage.
- Zuhro, R. S. (2019). *Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019*. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>